

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir dan Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Afandi, Muhammad. “Analisis Pelaksanaan Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.” Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. <https://repository.unissula.ac.id/24923/>.
- Agama, Kementerian. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- “Analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 terhadap diskriminasi penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - Walisongo Repository.” Diakses 24 April 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19386/>.
- Arrido, Sanoptri. “Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2020.” Other, Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/10862/>.
- Ayusari, Tri Widhi, Tedi Sudrajat, dan Sri Hartini. “Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Kewajiban Kepegawaian (Studi Di Kabupaten Banyumas).” *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (12 Februari 2020). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2020.2.1.20>.
- Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan, 2014.
- Ellis-Jones Ian. *Essential Administrative Law, Third Edition*. Portland: Cavendish Publishing, 2003.
- Eny Kusdarini. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Handoko. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 2015.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum tata pemerintahan*. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- L Neville Brown dan John S. Bell. *French Administratif Law*. Oxford: Clarendon Press, 2003.

- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muchsan. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.
- Nurman Mauludin, -. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Kota Tasikmalaya.” Other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022. <http://repository.upi.edu>.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- “Polemik Pembatalan Kelulusan PPPK di HST, Akibat Kementerian Tidak Tegas - Radar Banjarmasin.” Diakses 8 April 2024. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973150016/polemik-pembatalan-kelulusan-pppk-di-hst-akibat-kementerian-tidak-tegas>.
- Pratama, Andika Putra, Achmad Ghazali, Nur Arief R. Putranto, Ken Ratri Iswari, Anggara Wisesa, dan Hary Febriansyah. “Civil Servants’ Competence in Indonesia: Suggestions for Future Research in the Context of Business.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169 (Januari 2015): 371–77. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.322>.
- Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, dan Iwan Erar Joesoef. “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (30 Juni 2020): 1. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1830>.
- R.D.H. Koesoemahatmadja. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1975.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.
- . “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” 2009.
- . “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” 2014.

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Singh, S.S. “Distilling Contributions of Administrative Law in Promoting the Culture of Good Governance.” *Indian Journal of Public Administration* 44, no. 3 (Juli 1998): 374–84. <https://doi.org/10.1177/0019556119980313>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI Press, 2014.
- Stroik, F.A.M, dan J.G. Steenbeek. *Inleiding in het staats-en Administratief recht*. Alphenaan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, t.t.
- Syafie, Inu Kencana. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Syarifudin, Ateng. *Kepala Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014,” t.t.
- Widjiastuti, Agustin. “Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN.” *Perspektif* 22, no. 2 (31 Mei 2017): 115–29. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>.